

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Chaidar. (2011). *Terorisme Anatomi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Agus Surya Bakti. (2014). *Darurat Terorisme: Kebijakan Penanggulangan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Pers.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pendidikan Rangkang.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2009). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Muhammad Sofyan, Amir Ilyas, dan Abd. Dengan adanya. (2014). *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Grup Prenadamedia.
- Jeremy Bentham. (1960). *Pengantar Prinsip-Prinsip Moral dan Legislasi*. Oxford: Basil Blackwell.
- Nur Aflihyana, Bugi ; Syarif Saddam Rivanie Parawansa; Harris Arthur Hedar; dan Muhadar. (2021). *Perkembangan Statistik Kejahatan Terorisme di Indonesia*. Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Surya Dharma. (2017). *Deradikalisasi: Konsep dan Strategi Penanggulangan Terorisme*. Jakarta: Komunitas Cerdas Damai.
- Michael Foucault. (1995). *Disiplin dan Hukuman: Kelahiran Penjara* (A. Sheridan, Terj.). New York: Vintage Books.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Noor Huda Ismail,. (2015). *Deradikalisasi: Menuju Implementasi Kebijakan Penanggulangan Terorisme yang Realistis di Indonesia*. Jakarta: IPAC Policy Paper.
- Kadarudin. (2021). *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci.
- Edwin M Lemert, (1951). *Patologi Sosial: Pendekatan Sistematis terhadap Teori Perilaku Sosiopat*. New York: McGraw Hill.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- M. Romli Atmasasmita. (1995). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M.Syafi'i. (2021). *Hukum Pidana dan Terorisme*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Namira Wulandari Nawawi, Nur Azisa, dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa. *Kompensasi bagi Korban Tindak Pidana*. Makassar: Karya Bakti Makmur, 2023.

Syarif Saddam Rivanie Parawansa. (2022). *Hukum Pidana Terorisme (Hakikat dan Sanksi)*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

_____. (2023). *Aspek Filosofis Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Saefudin Zuhri. (2017). *Deradikalisasi Terorisme*. Jakarta: Daulat Pers

Jurnal

Insan Firdaus. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 6 No. 2, 2022.

Nur Kemala Putri, dkk. "Pengaruh Teori Rehabilitasi terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2, 2022.

Petrus Reinhard Golose dalam Josefhin Mareta. "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 4, 2018.

R. R. Lyia Aina Prihadiati, dkk. "Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan dengan Keadilan bagi Pelaku Terorisme." *Humaniorum*, Vol. 1 No. 4, 2023.

Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188.

Robbi Fathan, Syarif Saddam Rivanie, Muhammad Said Karim, Ismail Iskandar, Sriyana, & Hamzah Halim. "The Integration of the LPSK into the Criminal Justice System." *SIGn Journal of Social Science*, Vol. 6 No. 1, 2025.

Syarif Saddam Rivanie. "Pengadilan Internasional dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme: Tantangan Hukum dan Politik." *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2020.

Website / Artikel Online:

BNPT. (2024). *BNPT Jalankan Program Deradikalisasi dan Maksimalkan Yayasan Mitra Deradikalisasi di Makassar*. Diakses dari: <https://www.bnpt.go.id/bnpt-jalankan-program-deradikalisasi-dan-maksimalkan-yayasan-mitra-deradikalisasi-di-makassar>

Roedy Widodo. (2024). *BNPT Gelar Silaturahmi Kebangsaan: Membangun Solidaritas dan Suarakan Perdamaian antara Penyintas dan Mantan Pelaku Teror*. Diakses dari: <https://www.bnpt.go.id/bnpt-gelar-silaturahmi-kebangsaan-membangun-solidaritas-dan-suarakan-perdamaian-antara-penyintas-dan-mantan-pelaku-teror>

Profil Pelajar. (2025). *Terorisme di Indonesia*. Diakses dari: https://profilpelajar.com/Terorisme_di_Indonesia

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6216).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 3886).
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Lembaran Negara Tahun 2010 SETKAB).
- Peraturan Kepala BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Deradikalisasi. Lembaran Negara Tahun 2020 Sumber Berita Negara).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Berita Negara 2020 Sumber Nomor 1351).
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 6417).
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Tahun 2022 \Nomor 117).